

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Palembang, keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Namun, pelaksanaan SLF masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala-kendala ini, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SLF, kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, hingga tantangan administratif yang rumit, dapat berpotensi mengancam keselamatan bangunan dan penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi bangunan yang aman dan layak fungsi.

Secara keilmuan bangunan gedung mempunyai waktu untuk digunakan atau yang lebih dikenal dengan umur bangunan, dimana gedung tersebut dapat digunakan oleh pengguna bangunan. Pada waktu proses perencanaan bangunan, pasti terdapat perbedaan dengan proses konstruksinya atau pembangunannya. Perbedaan tersebut antara lain adalah dalam segi bentuk, fungsi bangunan, intensitas bangunan, dan kualitas material yang terpasang pada bangunan tersebut. Saat penggunaan bangunan gedung pastinya terdapat beban yang bekerja, yang membebani bangunan tersebut yaitu beban hidup dari pengguna bangunan yang membuat bangunan beralih fungsinya akhirnya juga berubah dari nilai tata guna bangunan.

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sertifikasi laik fungsi. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang, terdapat sejumlah bangunan yang belum memiliki sertifikat laik fungsi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan pengembang tentang pentingnya sertifikasi.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan inti dari standart keandalan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah serta SLF mulai tahun 2010 akan menjadi dokumen yang wajib dimiliki setiap bangunan gedung, baik yang baru ataupun yang sudah lama berdiri. Ketentuan tentang penerbitan SLF yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2002 ini tentang bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kelaikan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ciptan Kerja, dikeluarkan peraturan pemerintah demi memastikan keselamatan pengguna bangunan pada intinya.

Pedoman tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sendiri, telah diterbitkan sejak 9 Agustus 2007 yang lalu, melalui ketetapan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang “Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung”, secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih baru ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang “Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung”

Berbagai faktor dari penyebab robohnya dan kebakaran suatu bangunan gedung

adalah kelalaian dari perencana, konsultan dan pengawasan dari pemerintah maupun pemilik bangunan gedung dalam melakukan perawatan bangunan serta tidak ada kontrol terhadap bangunan yang sudah selesai dan akan digunakan oleh masyarakat dengan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap struktur bangunan gedung tersebut sesuai dengan komponen-komponen yang dapat berkerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekuatan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lainnya dari kondisi disekitarnya seperti tanah longsor, gempa, angin kencang, dan sebagainya .

Dari penjelesan tersebut diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pelaku jasa kontruksi atau pengkaji teknis bangunan gedung Di kota Palembang apakah sudah sesuai dengan undang - undang nomor 28 tahun 2002 tentang keselamatan bangunan gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Permen PU Nomor 25/PRT/M/2018 , sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Analisis Pelaksanaan Sistem Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Di Kota Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka didapat permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana dampak pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)bangunan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaku Jasa kontruksi / pengkaji Teknis bangunan gedung dan masyarakat?
2. Bagaimana hubungan antara pemahaman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap adanya kewajiban setiap bangunan harus memiliki SLF ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa dampak yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaku jasa konstruksi / pengkaji teknis bangunan gedung dan masyarakat mengenai pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2. Menemukan korelasi antara pemahaman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan terhadap dampak yang dirasakan dengan adanya kewajiban Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengawasan dan peningkatan infrastruktur bangunan
2. Sebagai informasi dan sosialisasi kepada pelaku Jasa pengkaji teknis bangunan gedung dan masyarakat tentang pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR no.27/PRT/M/2018
3. Sebagai informasi bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian mengenai Sertifikaat laik Fungsi Bangunan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini terdiri dari:

1. Menganalisa pengaruh metode Analisis Pelaksanaan Sistem Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Di Kota Palembang.

2. Membandingkan karakteristik metode tersebut dengan perencanaan, penjadwalan dan pengendalian untuk dapat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan setiap masalah dalam penyusunan Tesis ini akan dibuat sistematika dari pokok yang dibahas. Mengenai pokok yang dibahas antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pengertian dan konsep teori Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian proyek konstruksi, metode Analisis Pelaksanaan Sistem Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan metodologi penelitian, tempat dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode komparasi dan diagram alir penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pemaparan dari hasil-hasil dari tahap pengumpulan data, tabulasi data metode perencanaan, pengendalian, alat digunakan dan tahapan pelaksanaan. Hasil Analisa data merupakan hasil diskusi, elaborasi dan perbandingan dari masing-masing metode Pengkaji teknis bangunan gedung.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang yang dapat diambil mengenai perbandingan metode perencanaan, pengendalian dan penjadwalan proyek konstruksi dari hasil penelitian yang akan berupa saran-saran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

